

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu badan usaha yang di dalamnya orang-orang bekerja sama, menggabungkan tenaga kerja, modal, dan sumber daya untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Dewi & Abundanti, 2019). Bisnis tidak hanya harus memaksimalkan pendapatan tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, terhindar dari hutang, mempertahankan keuntungan agar tetap stabil, mengalahkan persaingan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Operasi bisnis harus diubah dan hal ini harus dilakukan terus-menerus. Inisiatif-inisiatif ini memprioritaskan stabilitas jangka panjang dan perluasan bisnis selain tujuan jangka pendek. Perusahaan dapat terus memberikan nilai bagi konsumen, karyawan, dan pemegang saham dengan menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, tujuan perusahaan sangat terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang semuanya akan membantu menjaga nama baik perusahaan dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, mendukung tujuan perusahaan merupakan taktik penting yang perlu digunakan dalam semua keputusan operasional dan terkait bisnis.. Penting bagi investor untuk menilai perusahaan sebagai salah satu faktor penting saat mempertimbangkan investasi. Nilai perusahaan mencerminkan kesehatan dan potensi pertumbuhan bisnis, yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi (Saputra et al., 2023). Salah satu elemen penting yang secara langsung mempengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan adalah kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan ini dapat diwujudkan melalui peran seorang Chief Executive Officer (CEO), yang merupakan individu kunci dalam mengarahkan tujuan perusahaan, mengambil keputusan

strategis, dan mencapai hasil yang diinginkan(Purwanto, 2023). Dalam konteks ini, fenomena menarik yang menjadi perhatian adalah adanya *Dualitas CEO*, yaitu saat satu individu mengemban dua peran sekaligus, yaitu *CEO* dan Ketua Dewan Direksi dalam sebuah perusahaan(Tuti Sumanih, 2023).

Tidak semua perusahaan memiliki *Dualitas CEO*,dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu gabungan peran *CEO* dan Ketua Dewan Direksi, yang dikenal sebagai *Dualitas CEO*, masih memunculkan perdebatan apakah hal ini bermanfaat atau merugikan bagi nilai saham perusahaan. Teori agensi berpendapat bahwa dualitas *CEO* memberi terlalu banyak kekuasaan kepada *CEO*, merendahkan peran dewan direksi, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham. Teori stewardship mengatakan bahwa ketika seorang *CEO* juga menjadi ketua dewan direksi, hal ini bisa menciptakan kepemimpinan yang lebih kompak dan mempermudah pengambilan keputusan cepat dalam pasar yang kompetitif dan cepat berubah. Pendapat mengenai praktek dualitas *CEO* bervariasi tergantung pada konteks negara masing-masing. Beberapa negara mungkin melihatnya sebagai hal positif, sementara negara lainnya mungkin memiliki pandangan berbeda terkait manfaat dan risikonya. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam memahami apakah dualitas *CEO* memberi dampak yang positif atau negatif terhadap nilai perusahaan dan keuntungan bagi pemegang saham. Di Indonesia sendiri *Dualitas CEO* juga dapat diartikan sebagai hubungan kekerabatan (Tuti Sumanih, 2023), dimana dua individu yang mempunyai hubungan dekat menempati dua ruang tersebut (orang tua, anak, cucu, keponakan). Karena struktur kepemimpinan perusahaan keluarga dicirikan oleh interaksi kekeluargaan, biasanya terdapat tanda-tanda dualisme *CEO*.

Analisis hubungan antara dualitas *CEO* dan nilai perusahaan telah dilakukan di masa lalu.. Penelitian (Saputra et al., 2023) *Dualitas CEO* secara signifikan

mengurangi nilai perusahaan, menurut penelitian tentang pengaruh keragaman gender dewan, independensi dewan, masa jabatan CEO, dan dualitas CEO terhadap nilai perusahaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika ada CEO ganda, kekuasaan eksekutif meningkat dan pengawasan dewan berkurang. Penelitian juga sejalan dengan (Laurencia & Meiden, 2020) menunjukkan jika Dualitas CEO tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian(Diedra & Agustina, 2021) Kualitas seorang CEO dapat diukur dari kemampuannya dalam memegang peran ganda sebagai anggota dewan komisaris dan sebagai pemimpin eksekutif perusahaan. *Dualitas CEO* dianggap sebagai sesuatu yang istimewa dalam pandangan para pemegang saham, dan diyakini dapat membentuk kepemimpinan yang efektif. Kehadiran *Dualitas CEO* dianggap penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pendukung konsep kepemimpinan dualitas ini meyakini bahwa hal tersebut dapat berdampak pada nilai perusahaan secara positif. (Laela Nurul Syariah, 2023) menunjukkan bagaimana dualitas CEO secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan penelitiannya, pemegang saham memandang dualisme CEO sebagai sesuatu yang khas dan menganggapnya menumbuhkan kepemimpinan yang efektif. Peran ganda CEO sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Para pendukung kepemimpinan dual CEO setuju dengan hal ini karena menurut mereka hal ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah metrik penting untuk memenangkan kreditor dan investor. Tujuan utama memulai bisnis adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan karena hal itu memungkinkan bisnis meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik. (Ferjiana & Natalylova, 2023). Di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat fenomena yang melintasi tentang nilai perusahaan sering mengalami fluktuasi, bahkan tanpa adanya perubahan kebijakan

keuangan pada setiap waktu. Kebijakan keuangan ini mencakup distribusi deviden tahunan, kegiatan investasi, dan pendanaan perusahaan. Variasi harga saham lebih berkorelasi langsung dengan perubahan nilai perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat berfluktuasi seiring dengan masuknya modal asing ke dalam sistem keuangan, sehingga menjadi pendorong utama penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi atau bisnis menjadi faktor utama yang mendorong setiap perusahaan untuk berusaha maksimal dalam mencapai laba yang tinggi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keseluruhan aset yang dimiliki suatu perusahaan tercermin dalam nilai perusahaannya. Kreditor dan investor lebih cenderung berpikir bahwa uang yang mereka pinjamkan akan terbayar dengan baik jika perusahaan dinilai tinggi. Di sisi lain, investor dan kreditor bisa saja meragukan kemungkinan pengembalian pinjaman jika nilai perusahaan rendah. Selain itu, salah satu ukuran yang digunakan investor sebagai landasan ketika ingin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan adalah harga saham perusahaan tersebut (Ferjiana & Natalylova, 2023). Ada dua kategori faktor lingkungan yang mempengaruhi harga saham: internal dan eksternal. Penyesuaian harga, pengenalan produk baru, sumber keuangan, merger bisnis, perluasan pabrik, dan penerbitan laporan keuangan adalah contoh kekuatan internal. Sedangkan variabel eksternal meliputi keadaan perekonomian, lingkungan hidup, ikatan politik, inflasi, penurunan suku bunga, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Nilai pasar saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh gabungan seluruh variabel tersebut.

Dari beberapa faktor tersebut aspek politik memiliki relevansi yang sangat penting. Hal ini karena politik melibatkan kebijakan dan tindakan pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap cara perusahaan menjalankan operasinya. Oleh karena itu, aspek politik tidak boleh diabaikan dan harus dipahami dengan baik oleh

perusahaan (Joseline et al., 2021). Perusahaan yang bertujuan untuk dekat dengan politisi atau pemerintah atau yang memiliki hubungan politik tertentu dianggap memiliki hubungan politik., koneksi politik menurut Faccio (2006) adalah apabila pengurus atau pemegang saham perusahaan menduduki jabatan yang mempunyai kewenangan seperti menteri, kepala negara, atau anggota parlemen, serta pejabat dan lembaga negara. Salah satu negara pertama yang mengkaji hubungan antara ikatan politik dan nilai-nilai perusahaan adalah Indonesia. Dengan kata lain, sangat penting untuk mewaspadai pembatasan korporasi dan politik di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut. Peraturan ini memperbolehkan pejabat publik menjadi pemilik perusahaan. Artinya, diperbolehkan bagi seorang tokoh terkemuka untuk menduduki posisi tinggi di suatu perusahaan, seperti direktur. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pejabat publik di Indonesia juga memiliki peran penting di dunia bisnis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami aturan politik terkait dalam mengelola perusahaan di Indonesia(Sulistiyowati et al., 2020).

Sebagai contoh menurut (CNBC Indonesia) daftar pengusaha Indonesia yang terjun ke dunia politik semakin bertambah. Diantaranya, Erick Thohir mengungkapkan kekayaan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 2,3 triliun berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021.). Utang yang berjumlah Rp 165 miliar itu telah mengurangi seluruh kuantitas kekayaan. Erick Thohir terkenal sebagai pemilik Mahaka Group, sebuah perusahaan induk yang membawahi bisnis digital, event planner, stasiun radio dan televisi, sebelum terjun ke dunia politik. Selain berprofesi sebagai politikus, Aburizal Bakrie memiliki perusahaan di sejumlah industri. Diantaranya adalah properti, energi, media massa,

perkebunan, operator telekomunikasi dan seluler, infrastruktur, kesehatan, jasa keuangan, energi, pertambangan batu bara, minyak, dan teknologi.. Sebelum terlibat di politik, Sandi adalah seorang pengusaha yang memiliki investasi di berbagai sektor melalui PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Sandi adalah pemegang saham terbanyak ketiga di SRTG dengan kepemilikan sebesar 21,51%. SRTG memiliki portofolio investasi yang luas, mencakup sektor energi, teknologi, infrastruktur, konstruksi, dan lain-lain. Beberapa perusahaan yang diinvestasikan oleh SRTG termasuk PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dan lain-lain. Hary Tanoe, anak pendiri MNC Group, memiliki kekayaan sekitar Rp 15 triliun menurut Forbes. Ia membangun bisnis media dengan lebih dari 60 stasiun TV, radio, dan surat kabar setelah lulus kuliah. Selain menjabat di berbagai anak perusahaan MNC Group, ia menjadi Komisaris Utama PT MNC sejak 2004, dan Direktur Utama di beberapa perusahaan termasuk PT Global Mediacom Tbk dan PT MNC Land Tbk. Pada 2016, ia mundur dari jabatan CEO di MNC untuk fokus pada politik. Pada 2022, PT MNC Studios International Tbk mengubah nama menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk, dengan Hary Tanoe sebagai Direktur Utama. Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai Nasdem, yang didirikannya pada tahun 2011 setelah berada di bawah naungan Partai Golkar. Sebelum terjun ke dunia politik, dia adalah seorang pengusaha dengan berbagai usaha. Pada tahun 2018, kekayaannya mencapai Rp 8,74 triliun, membuatnya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia menurut Globe Asia, menduduki peringkat 77.

Penelitian yang mendukung adanya *Dualitas CEO* dengan koneksi politik (Prasti et al., 2022) menunjukkan koneksi politik memperkuat korelasi penting antara Dualitas CEO dan kepemilikan keluarga, Perusahaan yang memiliki koneksi politik

mendapatkan berbagai manfaat yaitu pemotongan pajak, subsidi, kekuatan pasar , sehingga perusahaan dapat bertahan dalam persaingan pasar. Sejalan dengan penelitian (Yahaya et al., 2022) di Nigeria menunjukkan hubungan yang bermanfaat dan patut diperhatikan antara CEO dan koneksi politik. Sebaliknya penelitian (Hemdan et al., 2021) Mesir menunjukkan bagaimana dualitas CEO merugikan hubungan politik karena perusahaan yang terhubung secara politik bisa sangat mengganggu. Perusahaan yang memiliki ikatan politik mungkin mendapatkan keuntungan dari hal ini, namun hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai taktik untuk meningkatkan keuntungan melalui operasi bisnis yang lebih baik. Dengan memanfaatkan hubungan politik dengan bijak, perusahaan dapat meraih peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Evaestine Patriarini, 2020) Memiliki koneksi atau hubungan politik dapat dianggap sebagai strategi perusahaan. Perusahaan memiliki harapan dan ekspektasi bahwa melalui hubungan politiknya, perusahaan akan memperoleh keistimewaan atau kemudahan dalam berbagai aspek. Keyakinan ini didasarkan pada keyakinan bahwa keistimewaan atau kemudahan ini dapat berdampak positif pada perkembangan serta pertumbuhan perusahaan, sehingga menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menjalin dan merawat hubungan politik dengan baik.

Studi yang memperkuat hubungan antara ikatan politik dan nilai perusahaan (Maulana & Wati, 2020) Setelah mengkaji dampak struktur kepemilikan manajemen dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan, diketahui bahwa koneksi politik meningkatkan nilai perusahaan. Nilai korporasi meningkat seiring dengan meningkatnya koneksi politik. Penelitian (H. R. Pratiwi & Aligarh, 2021) tentang bagaimana kepemilikan keluarga, ukuran bisnis, profitabilitas, dan ikatan politik mempengaruhi nilai suatu perusahaan dan sampai pada kesimpulan bahwa ikatan

politik menambah nilai bagi suatu perusahaan. Investor memandang perusahaan yang memiliki ikatan dengan pemerintah akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan dan kemudian meningkatkan penilaiannya secara keseluruhan. Penelitian (DAROMES et al., 2022) tentang bagaimana kualitas audit memitigasi dampak ikatan politik terhadap nilai perusahaan juga menyimpulkan hubungan politik dapat meningkatkan persepsi terhadap perusahaan, mempengaruhi nilai pasar dan harga saham. Perusahaan dengan koneksi politik dianggap memiliki keuntungan dan hak istimewa. Sebaliknya menurut penelitian (Haryati et al., 2021) kesuksesan sebuah perusahaan tidak bergantung pada keterkaitannya dengan politik, baik itu melalui hubungan dengan pejabat pemerintah maupun partai politik. Penelitian (Sari & Sulastri, 2021) mengenai dampak agresivitas pajak dan ikatan politik terhadap nilai usaha sektor pertambangan Indonesia pada tahun 2016–2018, ditemukan bahwa ikatan politik antara suatu perusahaan dengan dewan direksi, dewan komisaris, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan

Penelitian ini memilih dualitas CEO sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan, dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi, atas beberapa pertimbangan. Pertama, peran CEO yang melibatkan kepemimpinan ganda dengan menjadi ketua dewan direksi dapat signifikan memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Kedua, pengaruh koneksi politik menjadi penting sebagai moderasi, karena keterlibatan politik dapat memoderasi hubungan antara *Dualitas CEO* dan nilai perusahaan, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah atau regulasi yang dapat memengaruhi industri tertentu. Ketiga, *Dualitas CEO* sering menjadi isu dalam tata kelola perusahaan, dan pemahaman bagaimana variabel ini berinteraksi dengan nilai perusahaan memberikan wawasan tentang efektivitas sistem

tata kelola perusahaan. Keempat, relevansi kontekstual, seperti kondisi ekonomi dan politik yang spesifik, dapat mempengaruhi hubungan tersebut, dengan koneksi politik mungkin menjadi faktor kritis yang perlu diperhitungkan. Terakhir, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting terhadap literatur akademis terkait tata kelola perusahaan, struktur kepemimpinan, dan faktor-faktor eksternal yang memoderasi hubungan tersebut, dengan dasar pada literatur terdahulu, temuan penelitian sebelumnya, dan pertimbangan teoritis yang mendukung pemilihan variabel dan moderasi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh dualitas CEO terhadap nilai perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberi judul skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dualitas CEO terhadap Nilai Perusahaan yang Dimoderasi oleh Koneksi Politik”

B. Batasan Masalah

Keterbatasan penelitian ini berpusat pada variabel moderasi nilai perusahaan dan ikatan politik. Objek penelitiannya meliputi seluruh perusahaan dari berbagai industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 - 2022. Informasi mengenai variabel independen diambil dari laporan keuangan yang dirilis pada saat itu. Perusahaan penelitian ini tidak bergerak di sektor keuangan.. Tahun penelitian dibatasi pada periode pada tahun 2018-2022 karena sebagai tahun perbandingan kinerja nilai perusahaan dan *political connection* di antara perusahaan-perusahaan selama beberapa tahun berturut-turut.

C. Rumusan Masalah

Mengacu penjelasan pada bagian latar belakang, penulis penulis merumuskan beberapa persoalan yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh antara dualitas CEO terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah koneksi politik dapat menjadi pemoderasi pengaruh dualitas CEO dengan nilai perusahaan ?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan paparan diatas bahwa tujuan dalam pengkajian saat ini yaitu:

1. Membuktikan pengaruh dualitas CEO terhadap nilai perusahaan secara empiris.
2. Membuktikan peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan Dualitas CEO terhadap nilai perusahaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang manajemen laba. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran yang berharga dan secara signifikan membantu pendidik dalam pengembangan penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian bisa menjadi landasan untuk penelitian setelahnya dengan fokus pada topik serupa, namun dengan analisis yang lebih terperinci. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga, masukan konstruktif, dan pertimbangan yang bermanfaat untuk pihak manajemen, pemilik perusahaan, dan pemegang saham. Tujuannya adalah

memberikan panduan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan kelangsungan eksistensinya, sehingga keputusan yang diambil dapat sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

F. Definisi Operasional Variabel

Istilah yang menjadi pedoman dalam penelitian atau kegiatan disebut dengan definisi operasional

- .Dualitas CEO (Variabel Independen)

Ketika seorang CEO menjabat sebagai dewan komisaris untuk dua atau lebih perusahaan pada saat yang sama, hal itu dikenal sebagai dualitas CEO. (Laela Nurul Syariah, 2023). *Dualitas CEO* diukur dengan keberadaan atau ketiadaan individu yang menjabat sebagai CEO (Chief Executive Officer) dan chairman dari dewan direksi perusahaan yang sama. Variabel ini dioperasionalkan sebagai variabel biner (1 untuk keberadaan Dualitas CEO, 0 untuk ketiadaan Dualitas CEO) berdasarkan informasi dari laporan tahunan perusahaan atau data kelembagaan terkait.

- Nilai Perusahaan (Firm Value)

Nilai perusahaan yang menjadi ukuran kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor sebelum melakukan investasi (Rossa et al., 2023). Nilai perusahaan merujuk pada valuasi pasar atau nilai intrinsik perusahaan, mencerminkan kinerja dan nilai ekonomis dari perusahaan tersebut. Nilai perusahaan diukur menggunakan variabel Market Capitalization (kapitalisasi pasar) yang diperoleh dari harga saham terakhir kali dikalikan dengan jumlah total saham beredar. Data ini dapat ditemukan melalui platform keuangan, laporan keuangan perusahaan,

atau sumber data keuangan terpercaya lainnya. Pengukuran nilai perusahaan menggunakan analisis Tobin'Q (Laela Nurul Syariah, 2023)

Rasio Tobin's Q dengan rumus :

$$Q = \frac{MVE + Debt}{Total Asset}$$

Keterangan :

Q = Nilai perusahaan

MVS = Market value of equity (Nilai pasar seluruh saham yang beredar)

Debt = Nilai Pasar Hutang

- **Koneksi Politik (Variabel Moderasi)**

Ikatan politik dalam perusahaan, suatu bisnis dianggap memiliki ikatan politik jika setidaknya salah satu eksekutifnya (dewan direksi atau komisaris), pemegang saham mayoritas, atau mereka yang kini menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, adalah anggota dari atau dekat dengan partai politik, atau pernah menjabat dalam kapasitas tersebut.. (Maulana & Wati, 2020). Koneksi politik mengacu pada hubungan dan pengaruh antara perusahaan dengan pihak politik, pemerintah, atau pejabat publik, yang dapat memberikan keuntungan kompetitif atau kebijakan yang menguntungkan perusahaan tersebut. Koneksi politik diukur menggunakan indeks atau skor koneksi politik yang mencerminkan tingkat akses dan pengaruh perusahaan terhadap keputusan politik. Skor ini dapat diperoleh melalui survei, analisis media, atau data publik yang menggambarkan hubungan perusahaan dengan politisi atau lembaga pemerintah (I. S. Pratiwi & Siregar, 2019)